

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penganggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pada organisasi privat atau swasta, anggaran merupakan suatu hal yang sangat dirahasiakan, sedangkan untuk organisasi sektor publik anggaran merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik, dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangat lah penting karena beberapa alasan, yaitu karena anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran juga diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya, sedangkan keinginan masyarakat tidak terbatas dan terus berkembang, dan anggaran juga diperlukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu mensejahterakan masyarakat maka penyusunan anggaran harus akuntabel.

Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat,

relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban.

Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah.

Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, anggaran merupakan dokumen/kontrak politik antara pemerintah dan DPRD sebagai wakil rakyat untuk masa yang akan datang (Mardiasmo, 2002). Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah Melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* yang mana pemerintah sebagai agen dan masyarakat (yang diwakili oleh lembaga perwakilan atau DPRD) sebagai prinsipal.

Akuntabilitas Melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Selain itu, anggaran merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen karena anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi.

Untuk memperoleh laporan kinerja keuangan yang memenuhi prinsip akuntabel serta Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kepala Daerah sebagai pejabat perbendaharaan Negara di tingkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota harus menetapkan suatu kebijakan umum dibidang akuntansi yang berisi tentang prinsip-prinsip atau aturan-aturan pokok yang mengatur tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana kebijakan ini diatur melalui peraturan kepala daerah dengan mengacu pada peraturan daerah yang mengatur tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melihat pengaruh yang dapat diberikan oleh penganggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah, dan melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dairi**”

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Moh.Nazir adanya masalah karena:

Masalah timbul karena adanya tantangan,adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena,adanya kemeduaan arti (*ambiguity*), adanya halangan dan rintangan,adanya celah (gap) baik antar kegiatan atau antar fenomena,baik yang telah ada ataupun yang akan ada.¹

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Dairi ?
2. Apakah terdapat pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Dairi ?
3. Apakah terdapat pengaruh pelaporan/pertanggung jawaban Anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Dairi ?
4. Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan kinerja terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Dairi ?
5. Apakah terdapat pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dan pemeriksaan kinerja terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Dairi ?

¹ Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Keenam: Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal 111

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui apakah terdapat pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Dairi
2. Untuk Mengetahui apakah terdapat pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Dairi
3. Untuk Mengetahui apakah terdapat pengaruh pelaporan/pertanggung jawaban Anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Dairi
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemeriksaan kinerja terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Dairi
5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dan pemeriksaan kinerja terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Dairi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangsih konseptual bagi perkembangan dunia ilmu ekonomi khususnya analisis kinerja keuangan dan

sebagai pembelajaran penerapan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkan dengan realita yang ada di dunia nyata.

2. Manfaat praktis

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai cara menganalisis kinerja keuangan koperasi yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan.

2. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan koreksi dalam kinerja keuangan di Pemerintahan

3. Bagi akademis

Menjadi tambahan literatur dalam perkembangan ilmu akuntansi yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penganggaran

2.1.1 Pengertian Penganggaran

Dalam buku Indra Bastian penganggaran didefinisikan sebagai

kegiatan akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan bagi aktivitas entitas untuk jangka waktu tertentu dimasa mendatang, sekaligus berfungsi sebagai pedoman alat kontrol pelaksanaan aktivitas tersebut.²

Menurut Darsono.P dan Ari Purwati,M.

penganggaran adalah proses penyusunan anggaran yang dimulai pembuatan panitia, pengumpulan dan pengklasifikasian data, pengajuan rencana kerja fisik dan keuangan tiap – tiap seksi, bagian, divisi, penyusunan secara menyeluruh, merevisi, dan mengajukan kepada pimpinan puncak untuk disetujui dan dilaksanakan”³.

Sedangkan menurut Bahtiar Arif dkk

penganggaran (budgeting) merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja negara yang cenderung tanpa batas. Dengan kata lain Bahtiar Arif juga menjelaskan bahwa penganggaran merupakan aktivitas yang terus-menerus dari mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemeriksaan.⁴

Perencanaan dalam penyiapan anggaran sangatlah penting karena penganggaran merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja negara yang cenderung tanpa batas.

² Indra Bastian **Akuntansi Sektor Publik**, edisi ketiga Yogyakarta 2010 Hal 419

³ Darsono Prawironegoro dan Ari Purwati, **Penganggaran Perusahaan**, Edisi kedua, Mitra Wacana Media Jakarta

⁴ Bahtiar Arif dkk, **Akuntansi Pemerintahan**, Salemba empat, jakarta, 2002, hal 15

Penganggaran merupakan aktivitas yang terus – menerus dari mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pemeriksaan.

Menurut Mardiasmo dalam Deddi Nordiawan dan Ayutingtyas Hertianti:

...anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, dan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.⁵

Sebelum menyusun anggaran pemerintah harus menyusun rencana strategis. Rencana strategis itu disusun berdasarkan hasil analisis kekuatan dan kelemahan internal dan hasil analisis dari ancaman dan kesempatan eksternal dalam jangka panjang dan jangka pendek.

2.1.2 Tujuan Penganggaran

Penganggaran berfungsi untuk :

1. Memaksa manajer membuat rencana kerja.

Penganggaran memaksa manajer membuat rencana artinya, manajer harus selalu berfikir proaktif tentang perubahan yang akan terjadi dimasa depan. Kemampuan memprediksi masa depan itu dituangkan dalam bentuk angka-angka satuan fisik dan satuan uang yang berorientasi pada kelangsungan hidup perusahaan.

2. Tolak ukur mengevaluasi kinerja.

Penganggaran sebagai tolak ukur mengevaluasi kinerja artinya, bahwa kinerja manajemen harus dibandingkan dengan anggaran. Hasilnya adalah

⁵ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta, 2009, hal 22

varian; varian dihitung dan di analisis untuk koreksi rencana, anggaran dan pelaksanaan kerja.

3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar manejer.

Penganggaran dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar manejer artinya bahwa secara formal anggaran mengkomunikasikan rencana organsasi kepada semua level manajemen. Selanjutnya manajer mangadakan koordinasi untuk merealisasikan rencana tersebut.

4. Membantu pengambilan keputusan.

Penganggaran membantu manejer dalam pengambilan keputusan artinya bahwa anggaran mangarahkan perhatian manejer untuk mengambil keputusan.

2.1.3 Masalah Penganggaran

Meskipun penganggaran merupakan satu tugas pemerintah dari seluruh negara setiap tahun, berbagai persoalan masih sulit diselesaikan. Hal ini mengingat proses ini sangat luas dengan melibatkan banyak sumber daya, dipengaruhi juga oleh faktor eksternal dan internal dari pemerintah, serta ketidakpastian ekonomi dan politik. Untuk itu, berikut ini dipaparkan persoalan yang muncul dalam praktik penganggaran diberbagai negara, yaitu :

1. Waktu yang terbatas

Anggaran disusun setiap tahun dan bahkan sebelum selesai dibuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, pemerintah harus menyiapkan anggaran tahun depan. Siklus anggaran

tidaklah *subsequent*(estafet), tetapi terjadi *interception*(irisan) antara satu kegiatan dengan kegiatan lain dari tahun berikutnya.

2. Ketidakseimbangan antara pendapatan dengan belanja

Sudah sangat lazim di dalam penyusunan anggaran bahwa masalah utama adalah terbatasnya pendapatan dan tidak terbatasnya belanja. Untuk itu, banyak negara mengambil jalan pintas dengan mencari pendanaan dari luar negeri untuk menutupi kekurangan pendapatan. Kebijakan ini menjadi *disincentive* bagi pendapatan pajak.

3. Ketidakstabilan ekonomi dan politik

Faktor ini menyulitkan bagi pemerintah untuk menyusun anggaran yang memadai. Asumsi akan sering berubah sehingga anggaran harus direvisi.

4. Kelemahan administrasi dan akuntabilitas

Sering kali anggaran telah disusun dengan baik, tetapi administrasi belum dirancang secara memadai sehingga akuntabilitasnya menjadi lemah.

5. Pelaksanaan yang tidak memiliki kemampuan dan moral yang memadai

Ini merupakan masalah fundamental yang harus diselesaikan. Kemampuan bisa ditingkatkan dengan memperhatikan sistem perekrutan, penggajian dan penghargaan serta pendidikan, latihan dan sarana yang menunjang. Akan tetapi, yang lebih penting dari itu adalah mempersiapkan mental aparat. Bagaimanapun sistem disusun apabila pelaksanaan tidak bermoral, akan rusak semuanya.

2.2 Pengertian Penganggaran Sektor publik

Menurut *National on Governmental Accounting* (NCGA) yang saat ini telah menjadi *Governmental Accounting Standards Board* (GASB), definisi anggaran (budget) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Penganggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.

2.2.1 Fungsi Penganggaran Sektor Publik

Penganggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu:

1. Penganggaran sebagai alat perencanaan

Penganggaran merupakan suatu alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Penganggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang akan diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

2. Penganggaran sebagai alat pengendalian

Penganggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran diharapkan mampu memberi

rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

3. Penganggaran sebagai alat kebijakan fiskal

Penganggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Penganggaran sebagai alat politik

Penganggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik anggaran merupakan *political tool* sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan keahlian berorganisasi dan pemahaman prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.

5. Penganggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Penganggaran publik merupakan alat yang digunakan untuk koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu,

anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan keseluruhan bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6. Penganggaran sebagai alat penilaian kinerja

Penganggaran merupakan wujudnya komitmen dan budget holder. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai apabila dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

7. Penganggaran sebagai alat motivasi

Penganggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan staffnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

8. Penganggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang lingkup

Penganggaran publik tidak dapat diabaikan oleh kabinet, birokrat dan DPRD/DPR. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran sektor publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka.

2.2.2 Perencanaan Anggaran

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Nasional serta

keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan bernegara dan menghindarkan dari ketimpangan antar wilayah. Ketentuan mengenai sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro atau perencanaan yang berada pada tataran kebijakan nasional atas semua fungsi pemerintahan dan meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 serta Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah.

Menurut Muindro Renyowijoyo mengemukakan fungsi anggaran sebagai berikut:

- 1. Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara untuk periode yang akan datang.**
- 2. Alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan pemerintah.**
- 3. Alat pengawas terhadap kemampuan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.⁶**

Sesuai UU. No. 17/2003, lingkungan yang berhubungan dengan APBN (pasal 13, 14, dan 15) adalah:

1. Pemerintah Pusat
2. DPR

Pemerintah pusat yang di maksud disini meliputi:

⁶ Muindro Renyowijoyo, **Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba**, Edisi Pertama: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2008, hal 72

1. Presiden sebagai kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara
2. Menteri keuangan, selaku pengelola fiskal dan pemegang fungsi Bendahara Umum Negara (BUN).
3. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran /pengguna barang kementerian negara.

2.2.3 Pelaksanaan Anggaran

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pelaksanaan Anggaran oleh Kepala SKPD dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) ditetapkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran harus: (a) menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan; (b) menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro; (c) memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya; (d) menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung

mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer.

2.2.4 Pelaporan /Pertanggungjawaban Anggaran

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dilaksanakan secara periodik yang mencakup ;

- a. Laporan realisasi anggaran SKPD
- b. Neraca SKPD
- c. Catatan atas laporan keuangan SKPD

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK- SKPD) berkewajiban untuk:

- a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang disampaikan.
- b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek.
- c. Menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran .
- d. Menguji kebenaran sesuai dengan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan periode sebelumnya.

Kepala SKPD menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada kepala daerah, laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

2.2.5 Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan

tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PKPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja:

- a. Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja pemerintah daerah.
- b. PKPPD untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

2.2.6 Karakteristik Penganggaran Pemerintah

Untuk memperoleh konsep yang lebih jelas mengenai penganggaran pendapatan, adapun yang menjadi karakteristik anggaran sebagai berikut:

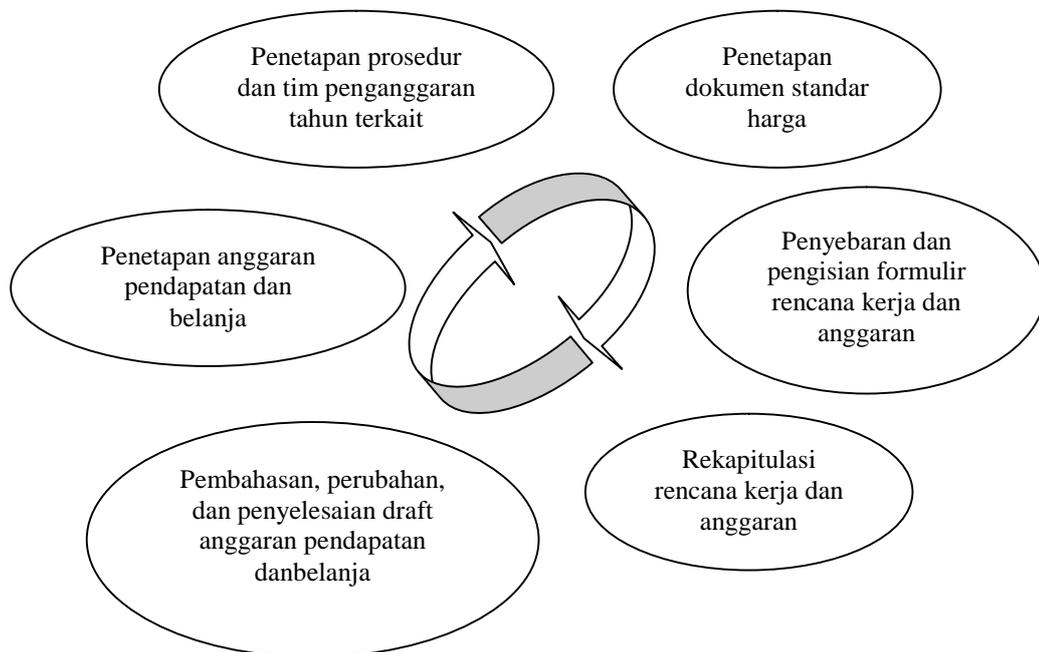
1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan.
2. Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun.

3. Anggaran yang berisi komitmen dan kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran yang telaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
5. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.2.7 Siklus Penganggaran Publik

Siklus penganggaran publik menurut Bastian terdiri dari tahapan berikut:

1. Penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait
2. Penetapan dokumen standar harga
3. Penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran
4. Rekapitulasi kertas kerja
5. Pembahasan perubahan dan penyelesaian draft anggaran pendapatan dan belanja
6. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja.



Sumber: Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Edisi Ketiga: Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 208

Siklus anggaran untuk pelaksanaan keuangan daerah adalah merupakan hal yang penting bagi sistem akuntansi pemerintah, yang dimulai dari penyusunan rencana anggaran, pengajuan RUU APBD kepada DPR, pembahasan dan persetujuan DPR sehingga menjadi UU APBD, pelaksanaan anggaran oleh pemerintah, pengawasan dan pemeriksaan atau pelaksanaan anggaran oleh aparat pengawasan fungsional sampai dengan pengajuan RUU PAD menjadi UU PAD.

2.3 Pengertian Anggaran Kinerja

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan. Menurut Indra Bastian

Anggaran kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi serta rencana strategis organisasi.

Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *Value for Money* atau pengawasan atas kinerja *output*. Dalam pengukuran kinerja *value for money*, menurut Mardiasmo efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

“Efisiensi alokasi (efisiensi 1), dan efisiensi teknis atau manajerial (efisiensi 2).

Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat *output* tertentu.⁷

Kedua efisiensi tersebut merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat apabila dilaksanakan atas pertimbangan keadilan dan keberpihakan terhadap rakyat. Anggaran kinerja mengalokasikan sumber daya ke program bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran output sebagai indikator kinerja organisasi. Tujuan dari pengukuran output yang dikaitkan dengan biaya adalah mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas. Hal ini sekaligus merupakan alat untuk dapat menjalankan prinsip akuntabilitas, karena yang diterima oleh masyarakat pada akhirnya adalah output dari suatu proses kegiatan organisasi.

Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menolak anggaran tradisional karena yang menganggap apabila tidak ada campur tangan terhadap anggaran, maka pemerintah akan menyalahgunakan kedudukannya dan

⁷ **Ibid hal 116**

melakukan pemborosan terhadap anggaran. Menurut pendekatan kinerja dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan audit keuangan, dan audit kinerja. Dengan kata lain pemerintah dipaksa harus dapat bertindak berdasarkan *cost minded* dan harus efisien, serta menggunakan dana secara efisien untuk mencapai tujuan pemerintah.

Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang. Dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah daerah memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja, organisasi atau unit organisasi tidak hanya diwajibkan menyusun anggaran atas dasar fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja, tetapi juga merencanakan kinerja yang ingin dicapai. Kinerja tersebut antara lain dalam bentuk keluaran (*output*) dari kegiatan yang akan dilaksanakan dan hasil (*outcome*) dari program yang telah ditetapkan.

Menurut Indra Bastian mengemukakan keunggulan pengukuran kinerja sebagai berikut:

- 1. Memungkinkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan.**
- 2. Merangsang partisipasi dan memotivasi unit kerja melalui proses pengusulan dan penilaian anggaran yang bersifat faktual.**
- 3. Membantu fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatan keputusan.**
- 4. Memungkinkan alokasi dana secara optimal dengan didasarkan pada efisiensi unit kerja.**
- 5. Menghindarkan pemborosan⁸**

⁸ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi ketiga, Yogyakarta, Penerbit Erlangga 2010

Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Menurut Abdul Halim (2007:178) prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu:

1. **Transparansi dan akuntabilitas anggaran**
2. **Disiplin Negara**
3. **Keadilan Negara**
4. **Efisiensi dan efektifitas anggaran**
5. **Disusun dengan pendekatan kinerja.**⁹

Adapun penjelasan mengenai prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Transparansi dan akuntabilitas anggaran**

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

2. **Disiplin anggaran**

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum/tidak tersedia anggarannya. Dengan kata lain, bahwa penggunaan setiap pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan yang diusulkan.

⁹ Abdul Halim, 2012, **Akuntnasi sektor publik**, edisi keempat: Salemba empat, jakarta, 2011 hal 22

3. Keadilan anggaran

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan, karena daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran masyarakat secara keseluruhan.

4. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berdasarkan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dalam melaksanakan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan *stakeholder*.

5. Disusun dengan pendekatan kinerja

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait.

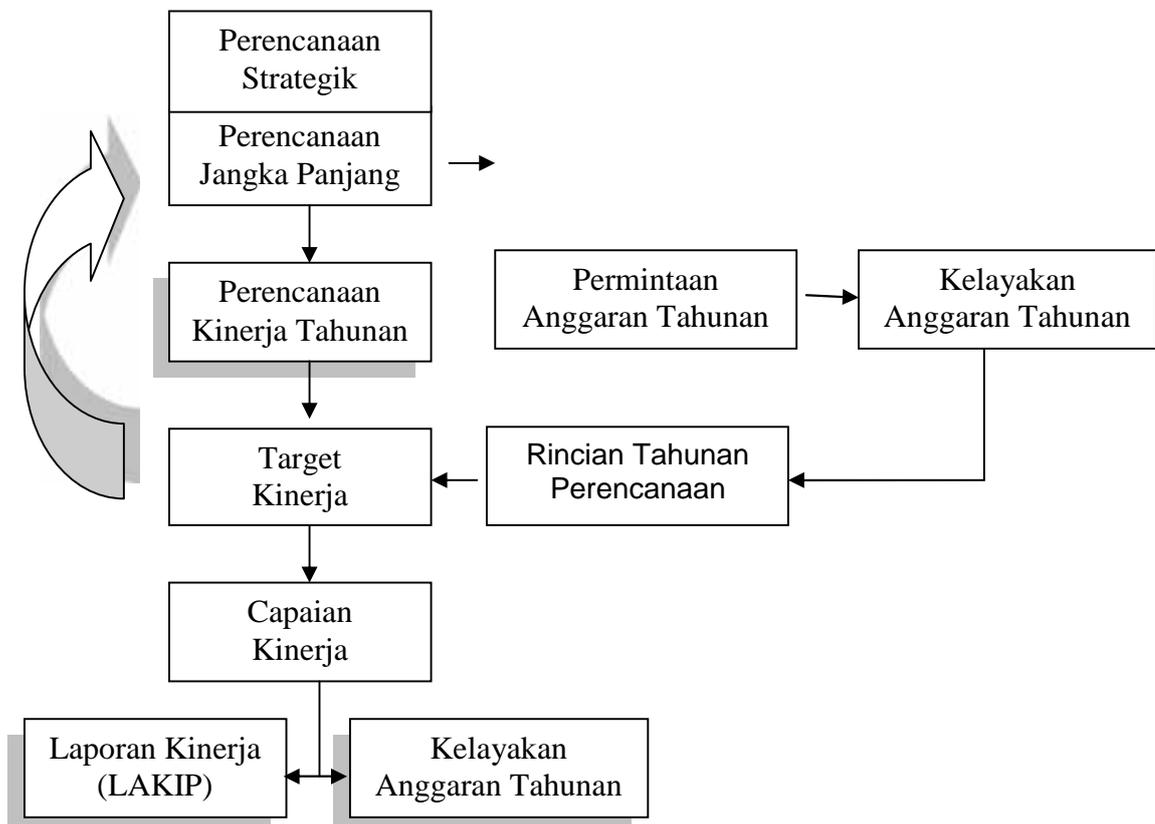
2.3.1 Kerangka Kerja Penganggaran Berbasis Kinerja

Sistem penganggaran berbasis kinerja memiliki suatu kerangka kerja yang secara sistematis dibangun untuk menghasilkan suatu anggaran berbasis kinerja. Secara umum kerangka kinerja pada sistem anggaran berbasis kinerja menurut Deputi IV BPKP di dalam Skripsi Haspiarti (2012) Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja yang menjelaskan bahwa pada dasarnya

“penyusunan anggaran berbasis kinerja tidak terlepas dari siklus perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban atas anggaran itu sendiri”.¹⁰

Rencana strategis yang dituangkan dalam target tahunan pada akhirnya selalu dievaluasi dan diperbaiki terus menerus.

Siklus penyusunan rencana yang digambarkan berikut ini menunjukkan bagaimana Anggaran Berbasis Kinerja digunakan sebagai umpan balik dalam rencana strategis secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah :



Gambar 2.1 Kerangka Kerja Sistem Anggaran Berbasis Kinerja

Sumber : Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Deputi IV BPKP

¹⁰ Haspiarti, **Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintahan** (2012)

Berdasarkan dari gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa awal proses perencanaan anggaran diawali dengan penyusunan rencana strategis organisasi. Penyusunan rencana strategis organisasi adalah proses untuk menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi dan menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Perencanaan strategis yang dibuat harus berorientasi pada keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai *stakeholders* utama. Pada umumnya rencana strategis umumnya memiliki jangka waktu beberapa tahun kedepan yang komponennya setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi berupa kebijakan dan program untuk mencapainya serta menyediakan indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu program/kegiatan.

Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi instansi dalam menyelenggarakan pemerintah untuk satu periode tahunan. Berdasarkan pada rencana kinerja tersebut, instansi menyusun rencana anggaran yang diperlukan untuk mewujudkan hasil – hasil (*outcome*) yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Anggaran yang disusun adalah anggaran dengan pendekatan kinerja karena dalam anggaran ini dapat merefleksikan hubungan antara aspek keuangan dari seluruh kegiatan dengan sasaran strategis maupun rencana kinerja tahunannya.

Rencana anggaran tahunan diajukan kepada legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan maka terbitlah rencana anggaran tahunan yang disetujui oleh legislatif. Berdasarkan rencana anggaran tahunan yang telah disetujui masing – masing instansi menyusun rencana operasional

tahunan. Rencana operasional tahunan adalah rencana pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program yang telah dituangkan dalam rencana kinerja tahunan. Rencana operasional biasanya termasuk jadwal kegiatan dan penyediaan sumber daya.

Berdasarkan pada rencana kinerja tahunan, rencana anggaran tahunan yang telah disetujui dan rencana operasional tahunan, disusunlah kesepakatan kinerja. Kesepakatan kinerja pada dasarnya adalah kesepakatan antara pemberi amanat kepada pihak yang menerima amanat tentang target –target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Dokumen kesepakatan antara pihak legislatif dengan pihak eksekutif yaitu dokumen kontrak kinerja.

Akhir tahun anggaran, setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan, manajemen kinerja melakukan review, evaluasi dan penilaian atas hasil yang telah dicapai dalam satu tahun anggaran. Pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target kinerja yang ada dalam kesepakatan kinerja dilaporkan ke dalam suatu laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja meliputi laporan kinerja keuangan dan laporan kinerja non-keuangan untuk dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan ditahun berikutnya.

2.4 Pengertian Akuntabilitas

Secara umum, dalam setiap pengelolaan anggaran selalu dikaitkan dengan akuntabilitas publik. Hal ini dapat dilihat dari defenisi akuntabilitas yang merupakan hal yang penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan

politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja perilakunya. Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program. Akuntansi kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam mengelola organisasi publik.

Konsep *Good Corporate Governance* berkembang seiring dengan tuntutan publik yang menginginkan terwujudnya kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggungjawab. Tuntutan ini sebenarnya merupakan jawaban publik terhadap semakin maraknya kasus-kasus penyimpangan korporasi di seluruh dunia. Akuntabilitas telah menjadi salah satu item yang tercantum dalam dasar hukum atau aturan organisasi. Karena organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya.

Akuntabilitas publik mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat atau pemerhati *independent* yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan yang tersedia sesuai dengan permintaan tingkat tinggi pemerintah.

Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu

1. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya

pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntansi Horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas merupakan konsep yang luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab.

Menurut Ellwood dalam Mardiasmo terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik Ellwood, yaitu:

1. **Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*accountability for probity and legality*)**
Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. **Akuntabilitas Proses (*process accountability*)**
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisien dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.
3. **Akuntabilitas Program (*program accountability*)**
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas”.¹¹

2.5 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)

2.5.1 Defenisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

¹¹ Mardiasmo **Akuntansi Sektor Publik** Edisi Keempat, Andi, Yogyakarta 2009

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

2.5.2 Prinsip – Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip – prinsip sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat

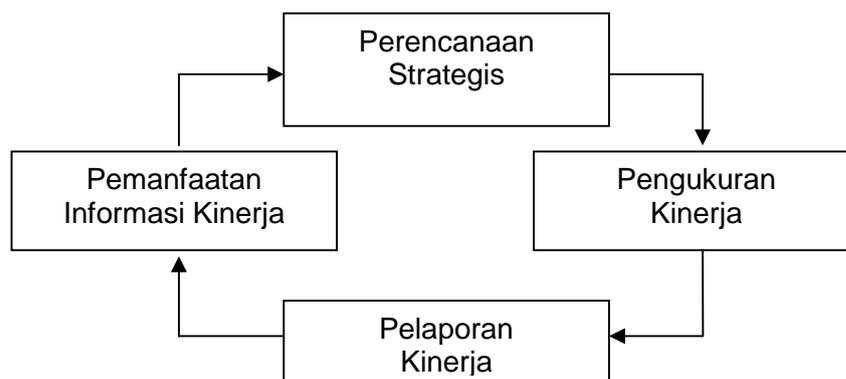
dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.5.3 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap - tahap sebagai berikut:

1. Penetapan perencanaan strategik.
2. Pengukuran kinerja.
3. Pelaporan kinerja.
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.2 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Pusdiklatwas BPKP, 2007

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti terlihat pada gambar diatas, dimulai dari penyusunan perencanaan stratejik (Renstra) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan stratejik ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun. Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

2.6 Kerangka Konseptual

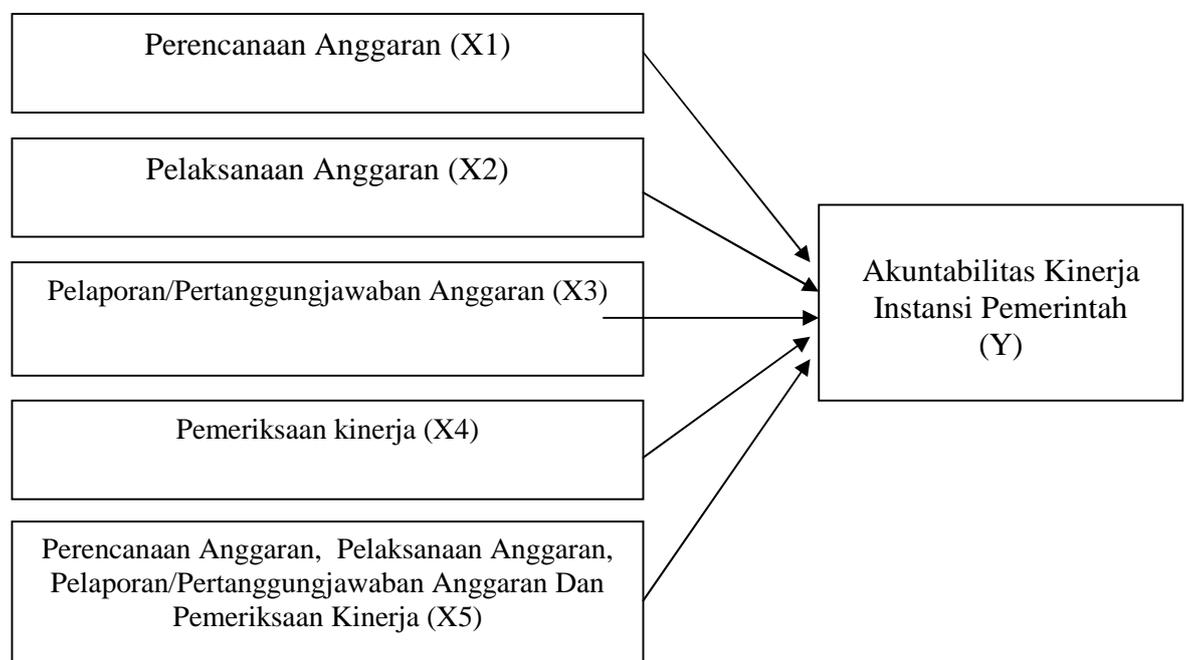
Kerangka konseptual merupakan sintesis atau ekstrapolasi dari kejadian teori yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis dan merupakan tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel ataupun masalah yang ada dalam penelitian.

Anggaran yang ditetapkan merupakan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah sehingga tercapainya anggaran berarti tercapainya sasaran pemerintah daerah. Maka dari itu, anggaran harus berkualitas dan realistis dan adanya pengendalian yang efektif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh penganggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan instansi pemerintah yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja sehingga akan tercipta akuntabilitas kinerja keuangan instansi pemerintah yang lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penganggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Dairi. Prinsip akuntabilitas merupakan pendekatan secara umum dapat meningkatkan mutu kinerja anggaran. Salah satu ciri akuntabilitas adalah mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Anggaran yang transparan yaitu apabila memenuhi terakomodasinya suara atau usulan rakyat.



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

Dimana :

X_1 = Perencanaan Anggaran

X_2 = Pelaksanaan Anggaran

X_3 = Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran

X_4 = Pemeriksaan Kinerja

X_5 = Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan/pertanggungjawaban Anggaran dan
Pemeriksaan Kinerja

Y = Akuntabilitas Kinerja Keuangan

—→ = Hubungan Antar Variabel.

2.7 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dilakukan oleh Syambudi Prasetia Bahri (2012) yang berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintahan. Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik.

2.8 Hipotesis

Menurut Bambang dan Lina (2010) adalah :

”Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.”¹²

¹² Bambang dan Lina, **Metode Penelitian Kuantitatif**, Jakarta, 2010, hal.76

2.8.1 Hubungan Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu. Anggaran daerah secara keseluruhan menurut undang-undang mencakup penyusunan kebijakan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah perencanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer. Sejalan dengan penelitian terdahulu Haspiarti(2012) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Parepare

Maka dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis yaitu:

H₁= Perencanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.

2.8.2 Hubungan Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah

Pelaksanaan anggaran melibatkan banyak orang dari pada perencanaan dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung

mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer. Dalam penelitian terdahulu Haspiarti (2012) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintahan kota Parepare.

Maka dari uraian diatas ditarik hipotesis yaitu:

H₂= Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja

2.8.3 Hubungan Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan pedoman penyusunan APBD berbasis kinerja , akhir tahun anggaran setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan, manajemen membuat laporan kinerja meliputi laporan kinerja keuangan berupa realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja non keuangan untuk dapat digunakan sebagai masukan untuk melaksanakan perbaikan ditahun berikutnya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas dana yang digunakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Dalam penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh pelaporan/pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Parepare.

Maka dari uraian diatas dapat dditarik hipotesis yaitu:

H₃ = Pelaporan/pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja

2.8.4 Hubungan Pemeriksaan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah

Pemeriksaan kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan kepadanya.

Tujuan dilakukan pemeriksaan kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi yang sudah direncanakan sehingga pemerintah tersebut dapat meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang. Dalam penelitian terdahulu Haspiarti (2012) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemeriksaan kinerja terhadap akuntabilitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Parepare.

Maka dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis yaitu:

H₄ = Pemeriksaan Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja

2.8.5 Hubungan Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran, Pemeriksaan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah

Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dan pemeriksaan kinerja merupakan prinsip dalam pelaksanaan *Good Governance*. Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran serta pemeriksaan kinerja secara konsep saling berhubungan. Dengan demikian proses pencapaian tujuan secara ekonomis, efektif dan efisien akan dapat diawasi dengan baik.

Dalam penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran pelaporan /pertanggungjawaban anggaran, dan pemeriksaan kinerja terhadap akuntabilitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Parepare.

Maka dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis yaitu:

H₅= Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan/pertanggungjawaban Anggaran dan Pemeriksaan Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam rangka mendapat data dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mengambil judul tentang Pengaruh Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi, dan melakukan penelitian ini di Bidang Sekretaris Daerah (SEKDA), Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah (DIPPEKA) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Dairi.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kausal berguna untuk mengukur hubungan antara variable riset, atau untuk menganalisis bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Penulis menggunakan desain penelitian ini untuk mengetahui apakah penganggaran sebagai variabel independen berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah sebagai variabel dependen. Penelitian ini menekankan pada pengukuran variabel dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Bungin (2011) adalah :

Dalam metode penelitian, populasi digunakan untuk menyebutkan sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya, populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, udara, tumbuh-tumbuhan, nilai, peristiwa, sikap, hidup dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber penelitian.¹³

Adapun populasi dari penelitian ini adalah pegawai negeri sipil di Sekretaris Daerah (SEKDA), Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah (DIPPEKA) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Dairi.

Menurut Mardalis dalam kamus riset karangan Komaruddin mengatakan bahwa (2014) :

***Sampling* atau sampel berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Tujuan penentuan sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan syarat mengamati hanya sebagian dari populasi suatu reduksi terhadap jumlah objek penelitian.**¹⁴

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*.

Menurut Sugiyono,

purposive sampling adalah teknik pengambilan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau dia mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.¹⁵

¹³ Burhan Bungin, **Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya**, Edisi Kedua, Cetakan Keenam: Perdana Media, Jakarta, 2011, hal. 109.

¹⁴ Mardalis, **Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal**, Edisi Ketiga Belas, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 53

¹⁵ Sugiyono, **Metode penelitian bisnis**, cetakan 11: Alfabeta, Bandung, 2008

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dipercayakan kepada responden yang memang dianggap mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai penganggaran, serta dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, kriteria pengambilan sampel adalah pegawai negeri sipil pada Sekretaris Daerah (SEKDA), Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah (DIPPEKA) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Dairi, dengan masa jabatan minimal tiga tahun. Maka jumlah responden yang dapat dijadikan sampel dan yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dalam pengambilan sampel adalah 30 orang. Kuesioner akan diberikan langsung kepada responden, kemudian akan diterima kembali pada tanggal 10 Februari 2016.

Jumlah Responden

No	Nama Instansi	Jumlah (Orang)
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi	1
2	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Dairi	1
3	Kepala Bappeda Kabupaten Dairi	1
4	Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi	1
5	Sekretaris Bappeda Kabupaten Dairi	1
6	Asisten Pemerintahan Setdakab Dairi	1
7	Asisten Administrasi Umum Setdakab Dairi	1
8	Inspektur Kab. Dairi	1
9	Sekretaris DIPPEKA Kabupaten Dairi	1
10	Kepala Bidang Pendapatan DIPPEKA Kabupaten Dairi	1
11	Staf Bidang Pendapatan DIPPEKA Kabupaten Dairi	2
12	Kepala Bidang Pengelolaan DIPPEKA Kabupaten Dairi	1
13	Staf Bidang Pengelolaan DIPPEKA	2

	Kabupaten Dairi	
14	Kepala Bidang Aset DIPPEKA Kabupaten Dairi	1
15	Staf Bidang Aset DIPPEKA Kabupaten Dairi	2
16	Kepala Bagian Administrasi Pembanguna Setdakab Dairi	1
17	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setdakab Dairi	1
18	Kepala Seksi Pembinaan DIPPEKA Kab. Dairi	1
19	Kepala Bagian Hukum Setdakab Dairi	1
20	Kepala Seksi Penyusunan DIPPEKA Kab.Dairi	1
21	Kepala Seksi Evaluasi DIPPEKA Kab. Dairi	1
22	Staf Bidang Anggaran DIPPEKA Kab.Dairi	3
23	Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Kab.Dairi	1
24	Staf Bidang Ekonomi BAPPEDA Kab.Dairi	1
25	Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA Kab Dairi	1
	Jumlah	30

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek yaitu jenis data penelitan yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian. Dengan demikian data subyek merupakan data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individual atau secara kelompok dari sumbernya.

3.4.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari responden yang telah ditetapkan oleh

peneliti, yaitu pegawai negeri sipil Sekretaris Daerah (SEKDA), Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah (DIPPEKA) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Dairi, dengan masa jabatan minimal tiga tahun. Melalui cara ini, peneliti memutuskan untuk secara langsung mencari, mengumpulkan, dan mengolah data untuk mendapatkan data yang relevan dan riil. Dalam data ini, peneliti mengolah kuesioner untuk mendapatkan data.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode survei dengan penyebaran kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada para responden untuk kemudian dijawab oleh responden yang bersangkutan. Kuesioner dalam penelitian ini dirancang untuk penelitian kuantitatif. Peneliti memilih untuk menggunakan metode ini karena kuesioner merupakan mekanisme pengumpulan data yang efisien. Dengan menggunakan kuesioner, peneliti dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan bagaimana mengukur variabel yang akan digunakan.

Skala pengukuran yang peneliti gunakan adalah skala likert yaitu dimana responden menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju atas pertanyaan yang diajukan secara tertulis oleh peneliti, mengenai perilaku obyek, atau kejadian.

Jawaban akan diberi skor:

1. Skor 1 = Sangat tidak setuju
2. Skor 2 = Tidak setuju

3. Skor 3 = Netral
4. Skor 4 = Setuju
5. Skor 5 = Sangat setuju

3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Variabel penelitian ini terdiri variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel independen yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah.

Tabel 3.1

Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator	Alat Ukur	Skala
Variabel Independen (X)				
<p>1.Perencanaan Anggaran adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.</p>	1. Pemerintah Daerah	- Mengelola Negara untuk periode yang akan datang.	Kuesioner	Likert
	2. DPR	- Pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan pemerintah.		
<p>2.Pelaksanaan Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.</p>	1. APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan	- Menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro.	Kuesioner	Likert
		- Memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya.		
		- Menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif.		

<p>3. Pelaporan /Pertanggungjawaban Anggaran Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dilaksanakan secara periodik.</p>	<p>1. Laporan realisasi anggaran SKPD</p> <p>2. Neraca SKPD</p> <p>3. Catatan atas laporan keuangan SKPD</p>	<p>- Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek.</p> <p>- Menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran.</p> <p>- Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.</p>		
<p>4. Pemeriksaan kinerja proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja</p>	<p>1. Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PKPPD)</p> <p>2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD)</p>	<p>- Mengukur, menilai, secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja pemerintah daerah.</p> <p>- upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.</p>		

Variabel	Dimensi	Indikator	Alat Ukur	Skala
Variabel Dependen (Y)				
Akuntabilitas Kinerja Keuangan , perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasi dalam rangka pencapaian tujuan.	1. Pertanggung jawaban, Kerbukaan, dan aksesibilitas	<p>1. Petanggungjawab n atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan.</p> <p>2. Pertanggungjawab n dilakukan dengan publikasi laporan keuangan secara teratur.</p> <p>3. Konsisten</p> <p>4. Pengelolaan keuangan secara jujur.</p> <p>5. Keterbukaan operasional,penyeb arluasan informasi, dan pelaporan kinerja atas program</p> <p>6. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik.</p> <p>7. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.</p>	Kuesioner	Likert

	<p>2. Kejujuran, proses, program dan kebijakan.</p>	<p>1. Penghindaran penyalahgunaan jabatan</p> <p>2. Prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.</p> <p>3. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan dengan baik.</p> <p>4. Mempertimbangan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.</p> <p>5. Pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.</p>		
--	---	--	--	--

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan konsistensi yang menunjukkan seberapa baik item-item pertanyaan yang digunakan dalam mengukur konstruk atau variabel. Suatu instrument dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang atas pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas pada umumnya diukur dengan melihat seberapa besar *alfa Cronbach*. Spss memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha*, dimana suatu instrument dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Dengan nilai yang lebih besar dari 0,60 data dianggap baik untuk digunakan dan sudah reliabel.

3.7.2 Uji Validitas

Uji validitas merupakan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Semakin tinggi tingkat validitas suatu alat tes, maka alat tes tersebut semakin tepat mengenai sarannya, atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, yang harus diganti/dibuang karena dianggap tidak relevan. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik, dengan kriteria:

- a. Jika r_{hitung} positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka butir pertanyaan tersebut valid.
- b. Jika r_{hitung} negatif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.
- c. r_{hitung} , dapat dilihat pada kolom *Coreected Item Total Corelation*.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi, maka diperlukan pengujian asumsi klasik yang meliputi:

1. Pengujian Multikolinieritas
2. Pengujian Heteroskedastisitas
3. Pengujian Normalitas

1. Uji Multikolinieritas

Menurut Husein Umar:

“Uji multikolinearitas berguna untuk mengetahui apakah pada model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen”.¹⁶

Multikolinieritas adalah kondisi dimana terdapat linear atau korelasi yang tinggi antara masing-masing variabel independen. Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi yang telah diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen. Mengukur multikolinieritas dapat diketahui berdasarkan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dari model penelitian. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10, dan nilai *tolerance* lebih besar dari nilai 0,1 maka dapat disimpulkan tidak ditemukan gejala multikolinieritas antar variabel independen.

¹⁶ *Ibid.* Hal. 82

2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan antara varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut juga homoskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan menggunakan metode *scatter plot*, dengan memplotkan ZPRED (nilai prediksi) dan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak ditemukan pola tertentu pada grafik, misalnya mengumpul ke tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit.

3. Uji Normalitas

Menurut Husein Umar:

“Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel independen dan dependen, atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak”.¹⁷

Pengujian normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Pengujian secara visual dapat dilakukan dengan menggunakan metode gambar normal *probability plots* dalam program SPSS.

Dasar pengambilan keputusan adalah:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

¹⁷ Husein Umar, **Desain Penelitian Akuntansi Keprilakuan**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal 79

2. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalita

3.8 Uji Hipotesis

Peneliti ini menggambarkan hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Dengan demikian, peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, tetapi juga menunjukkan ke arah mana pengaruh tersebut. Pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS.

Formulasi yang digunakan adalah:

$$Y = a + bX_{1,2,3,4,5} + e$$

Keterangan :

Y : Akuntabilitas Kinerja Keuangan

X₁ : Perencanaan Anggaran

X₂ : Pelaksanaan Anggaran

X₃ : Pelaporan/pertanggungjawaban Anggaran

X₄ : Pemeriksaan Kinerja

X₅ : Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,
Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran Dan Pemeriksaan Kinerja

a : Konstanta

b : koefisien regresi **X**

e : Kesalahan residual (*error*)

persamaan di atas dianalisis dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha=0,05$)

3.8.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur proporsi atau besarnya persentase variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi R^2 yang merupakan besaran nol negatif. Besarnya nilai R^2 adalah antara nol sampai dengan 1 ($0 \leq r^2 \leq 1$), hal ini dapat diartikan:

1. Jika $R^2 = 0$, menunjukkan tidak adanya pengaruh variabel antar variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika R^2 mendekati 1, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Jika R^2 semakin kecil dan mendekati nol, maka dapat dikatakan semakin kecil juga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.8.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Pengujian statistik t digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen secara individu (partial) dalam menjelaskan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0.05 ($\alpha=5\%$) dan juga membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} .

Penerimaan dan penolakan hipotesis dengan tingkat signifikansi dilakukan berdasarkan kriteria berikut:

1. Jika nilai signifikansi < 0.05 , maka hipotesis diterima

2. Jika nilai signifikansi > 0.05 , maka hipotesis ditolak.

Sedangkan penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} dilakukan berdasarkan kriteria berikut.:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis diterima.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka hipotesis ditolak.

3.8.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, secara bersama-sama. Hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan Uji-F, atau yang biasa disebut *Analysis of Variance* (ANOVA). Pengujian ANOVA atau Uji-f dilakukan dengan melihat signifikansi dan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} . Pengujian dengan tingkat signifikansi dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila hasil signifikansi pada tabel ANOVA $< 0,5$ maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, dan demikian pula sebaliknya. Sedangkan jika pengujian dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} , dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, dan demikian pula sebaliknya.